GERAKAN PROTES SOSIAL PETANI DI JAWA PADA MASA KOLONIAL (DALAM PERSPEKTIF SEJARAH SOSIAL PEDESAAN)

Abdul Muntholib
Jurusan Sejarah FIS Unnes

Abstract

Movements of social politics protest in all its forms is not a new thing in the history of Indonesia. Social protest movement of farmers in Java does not belong to the past history, but a historical phenomenon that is always present in every period of time, both in the past, present, and future. It should be always to question whether the factors that cause social protest Javanese rural farmers who can be seen in terms of economic, political, and social in the social history of rural perspective in Java.

Key words: Social protest movements, social history, farmers in Java

PENDAHULUAN

Pergerakan sosial politik dengan segala bentuknya bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. Fenomena semacam ini bahkan sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan patrimonial di Indonesia, jauh sebelum kedatangan kolonial Belanda.

Fenomena ini memang semakin meningkat setelah kedatangan kolonial Belanda, sebagaimana yang terjadi dari berbagai pergerakan sosial yang terjadi terus-menerus hampir selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pengolahan sosial atau protes sosial yang banyak hal mengambil tempat di daerah pedesaan dan lebih dikenal sebagai protes sosial petani di Jawa. Hal itu merupakan gerakan protes terhadap pemerasan, penindasan, dan kesewenang-wenangan pihak penguasa kolonial Belanda.

Ketika penetrasi kolonial secara intensif memasuki kehidupan sehari-hari rakyat biasa membayar pajak yang berat, pengerahan tenaga buruh yang berlebihan, dan peraturan yang serba menindas. Realitas kekuasaan kolonial Belanda tidaklah cocok dengan realitas sosial dan stabilitas yang dicita-citakan masyarakat pedesaan yang tepat. Setelah kedatangan kolonial Belanda diiringi proses disorganisasi dan disorientasi serta diikuti keresahan sosial yang menyebabkan alam pikiran simbolis masyarakat pedesaan di Jawa mengalami krisis. Proses perubahan ini merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergerakan sosial dalam masyarakat dengan segala manifestasi tindakannya.

Gerakan protes sosial petani di Jawa bukan hanya milik sejarah masa lalu saja, ia merupakan fenomena historis yang selalu hadir dalam setiap kurun waktu, baik di masa lalu atau masa kini. Bahkan, dapat dikatakan bahwa gerakan protes sosial petani di pedesaan Jawa bersifat laten dan endemis, sehingga perlu selalu dipertanyakan faktor-faktor apakah yang menimbulkan protes sosial tersebut serta dalam struktur sosial yang bagaimana proses sosial ini mendapatkan tempat. Kekuatan sosial manakah yang melibatkan masyarakat petani pedesaan di Jawa dalam protes sosial itu? Dalam hal ini, suatu perspektif sejarah sosial pedesaan akan sangat membantu dan menambah pemahaman terhadap persoalan ini. Perspektif sejarah sosial pedesaan yang berkaitan dengan proses sosial petani di pedesaan Jawa itu tidak dilihat semata-mata bersifat negative, tetapi dilihat sebagai cermin dinamika sosial masyarakat di pedesaan Jawa.

PROTES SOSIAL PETANI DI PEDESAAN JAWA PADA MASA KOLONIAL

Di dalam mengamati sejarah bangsa Indonesia, faktor masyarakat pedesaan tentu sangat relevan di dalamnya. Pengamatan atas fenomena berbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia, pada masa kolonial khususnya, memperlihatkan adanya ekspansi dan dominasi politik, ekonomi dan budaya oleh penguasa kolonial, yang telah mengakibatkan munculnya disorganisasi di kalangan masyarakat pedesaan.

Dari segi ekonomi, dengan diintroduksikannya sistem ekonomi uang (komersialisasi) yang membuka kemungkinan terciptanya sistem pemajakan, peningkatan kegiatan perdagangan hasil bumi, munculnya buruh upahan, serta masalah pemilikan dan penggarapan tanah, maka pengerahan tenaga dan kondisi kerja menjadi tergantung pada pihak penguasa kolonial. Selain itu, adanya perkembangan perdagangan dan industri pertanian telah menimbulkan diferensiasi struktural di dalam masyarakat Indonesia, yang juga menimbulkan peranan-peranan sosial baru yang diperoleh dengan cara yang berlainan dengan peranan kalangan masyarakat pedesaan.

Dalam bidang politik, semakin meluasnya penetrasi sistem administrasi pemerintah kolonial yang legal rasional akan menimbulkan ketegangan-ketegangan dan ketidakstabilan di kalangan penduduk, sehingga lembaga-lembaga politik tradisional akan semakin terdesak. Selain itu, munculnya proses birokrasi kolonial menurut ukuran Barat juga akan mengakibatkan turunnya kedudukan para penguasa tradisional menjadi alat birokratis yang sepenuhnya ditempatkan di bawah pengawasan kekuasaan kolonial.

Dalam pada itu, dengan adanya perubahan-perubahan di dalam kehidupan sosial, maka golongan-golongan sosial akan ditempatkan di luar kerangka sosial, dan sekaligus akan memperlemah kekuatan norma-norma tradisional sebagai pegangan hidup. Guna memperoleh wawasan yang lebih mendalam atas berbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan pada masa kolonial ini, agaknya perlu diberikan perhatian terhadap adanya dua pendekatan pemberontakan atau sebagai penguasa tanah, menduduki lapisan atas di dalam stratifikasi sosialnya. Selanjutnya mereka yang tergolong di dalam lapisan sosial elit desa terdiri atas para pemimpin agama serta para keturunan pendiri desa. Dalam pada itu, penduduk desa lainnya yang tidak memiliki tanah, petani penggarap, dan buruh tani, menduduki lapisan sosial paling bawah (James C. Scott, 1976).

Sejumlah studi yang membahas pemberontakan petani sebagaimana antara lain telah dilakukan oleh Sartono Kartodirdjo: '*Pemberontakan Petani di Banten 1999*", adalah buku terjemahan dari disertasi Prof.

DR. Sartono Kartodirdjo, yang pernah diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1965 oleh *Koninklijk Institut Voor Tall – Land- en Volkenkunde sebagai Verhandelingen* ke-50-nya yang berjudul "*The Peasants of Banten in 1988*". Pemberontakan tersebut dalam sejarah kolonial juga terkenal dengan nama pemberontakan Cilegon yang merupakan salah satu pemberontakan paling besar di Jawa sejak pemberontakan Diponegoro (1825-1830). Kota Cilegon dikuasai para pemberontak dan semua pejabat baik Belanda maupun Indonesia dibunuh. Meskipun tentara KNIL dari Batavia telah didatangkan untuk menindasnya, namun selama berminggu-minggu daerah Banten masih kacau. Huru-hara ini tidak terbatas pada Cilegon saja tetapi meluas sampai daerah sekitarnya.

Sebenarnya di Jawa selama abad ke-19 banyak sekali terjadi peristiwa pemberontakan petani. Walaupun tidak sebesar serta seluas Banten tahun 1888 – banyak hanya bersifat seperti suatu demonstrasi saja dengan mengangkat seorang pemimpin pemberontak sebagai ratu adil. Seperti juga di Banten pada tahun 1888 semua pemberontakan relatif mudah ditindas dan tidak mempunyai akibat-akibat lain dalam arti perubahan sejarah. Hal ini berlainan, misalnya dengan gerakan nasional dan politik lainnya yang memiliki sejarah yang besar. Pemberontakan petani bersifat lokal dengan pemimpin kharismatik dan kepercayaan besar akan kekebalan atau kesaktian para pelaku – kepercayaan akan kekebalan baik dari senjata tajam atau peluru inilah yang menentukan munculnya pemberontakan. Walaupun begitu tak ayal sebuah pemberontakan itu masih membekas pada sanubari masyarakatnya walaupun telah berlalu ratusan tahun.

Daerah Banten memang merupakan daerah yang paling "resah" di Jawa. Dalam hal ini memang Banten mirip dengan Aceh di Ujung Sumatera Utara yang dalam abad ke-19 diserang Belanda namun tidak pernah tunduk padanya. Seperti Aceh, Banten adalah kerajaan maritim, berlainan dengan negara agrarian yang sejak lama telah bersaing dengan Belanda. Kesultanan Banten dihapus oleh Deandels, Gubernur Jendral Pembangunan Negara kolonial Modern. Melenyapkan Kesultanan memang mudah – cukup dengan tanda tangan dan pada mulanya baik. Namun, pada perkembangannya tidak adanya lembaga kesultanan di Banten merupakan faktor penting munculnya pemberontakan, karena dengan tiadanya lembaga kesultanan, loyalitas beralih ke pemimpin agama karismatik seperti para haji dan kyai. Pada tahun 1980-an di Banten ada semacam "*religion revival*", yaitu kehidupan pesantren bertambah dan berbagai tarekat bermunculan.

Pesantren dan tarekat memperkokoh kedudukan guru melalui tali-tali erat dengan para muridnya. Penyebaran jimat meluas di masyarakat. Islam sendiri seperti dalam agama-agama lain yang mendorong tumbuhnya mesianisme, atau gerakan eskhatologis yang menjanjikan munculnya ratu adil dan semuanya menjadi bahagia. Tersebarnya di Banten waktu istilah seperti jihad, perang sabil, dan datangnya imam Mahdi, atau akan datang raja yang memerintah dengan bijaksana dan berkulit hitam. Kebencian terhadap Belanda semakin menjadi-jadi. Demikian pula kebencian pada para "pangreh praja" yang nota bene berasal dari daerah luar Banten.

Di Banten pada tahun 1808 kasultanan dihapus dan kehidupan agama yang dipertebal. Hal ini terlihat pada tahun 1820 dan keresahannya tahun 1820-an. Pada akhir abad ke-19 negara kolonial memang meluas lagi pengaruhnya sampai ke desa-desa.

Tidak adanya sistem tanam paksa ini menyebabkan juga tanah sawah di Banten dimiliki oleh pribadi-pribadi dan bukan merupakan tanah desa seperti di Jawa lainnya. Pemilikan tanah secara pribadi inilah yang oleh seorang Belanda (Residen Buyn) di lihat sebagai sebab banyaknya pemberontakan di Banten. Unsur ini tentu tidak dapat dibuktikan dan hanya merupakan spekulasi saja. Namun demikian, mungkin juga individualisme yang lebih besar dari pola pemilikan tanah ini, berkembang di Banten dan bertemu dengan Islam. Masalah-masalah agama dan politik memang masih kurang penelitiannya di Indonesia.

Di Banten sebetulnya pemimpinnya bukanlah petani melainkan kalangan elit agama bekas bangsawan Banten dan elit desa yakni para tuan tanah, sedangkan pengikutnya adalah penduduk desa biasa yang diantaranya banyak yang cukup berada. Seperti dimana-mana rupanya kesadaran politik ini terlihat justru di kalangan yang berada di daerah-daerah dengan masyarakat yang makmur. Bukan kemiskinan yang mendorong orang memberontak, tetapi justru pembelaan terhadap miliknya.

Penelitian Sartono Kartodirdjo di Banten, menunjukkan bahwa suatu keresahan petani bisa meledak menjadi sebuah pemberontakan atau gerakan radikal, apabila didasari beberapa hal berikut. *Pertama*, terdapat suatu tradisi untuk memberontak. *Kedua*, di daerah tersebut terdapat suatu aspek ketegangan yang berlangsung terus menerus yang bersumber pada keadaan dimana suatu lapisan besar penduduk mengalami ketersingkiran politik dan kehilangan previlage mereka. *Ketiga*, dampak penetrasi dominasi penguasa secara bersangur-angsur menyatukan sendi-sendi kehidupan beragama. *Keempat,* ada satu pimpinan revolusioner yang memberikan landasan rasional kepada gerakan perlawanan itu. Terakhir, suatu alat keorganisasian telah diciptakan untuk mengarahkan operasi-operasi dan memobilisasi sumber-sumber daya manusia dan materiil menurut ruang dan waktu.

Jadi inti tesis dalam penelitian Sartono Kartodirdjo bahwa gerakan radikal di Jawa mempunyai motor ideologis tertentu yang berdiri sebagai sumber motivasi dan tali pengikat solidaritas untuk melakukan suatu gerakan perlawanan dan didalamnya ada tokoh berpengaruh yang menjadi pimpinan gerakan.

Pendekatan gerakan sosial berangkat dari acuan yang mendasarkan analisisnya atas sumber-sumber tentang bentuk-bentuk kegelisahan masyarakat pedesaan. Bentuk-bentuk kegelisahan ini termanifestasikan dalam bentuk gerakan ataupun pemberontakan-pemberontakan maupun dalam tindakan kriminal, yang merupakan pencerminan dari adanya pembakar di dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan.

Pengamatan terhadap perubahan di dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan demografis ini menunjukkan, bahwa perubahan-perubahan ini sangat mempengaruhi hubungan-hubungan kekuasaan dan kejayaan di daerah pedesaan. Dapat pula diamati bahwa terjadinya ledakan jumlah penduduk segera diikuti oleh proses fragmentasi pemilikan tanah yang mempengaruhi struktur sosial di pedesaan.

Di balik itu, seperti telah disinggung di atas bahwa dengan diintroduksikannya ekonomi pasar pada saat itu, maka sedikit demi sedikit ada kesan dengan para petani pemilik tanah kecil melepaskan haknya atas tanah yang dimiliki kepada pihak lain. Lebih jauh muncul kecenderungan pula semakin besar petani yang terjerumus pada hutang piutang sebagai akibat dari semua itu, maka petani terpaksa harus menyerahkan tanahnya kepada orang lain dan kemudian menjadi buruh tani yang bekerja pada petani lain yang dapat memiliki tanah yang luas (Hertz, 1983).

Dari kemunculan gejala perubahan-perubahan dalam hal pula kepemilikan tanah, maka pada gilirannya akan menyebabkan lahirnya perubahan kedudukan di daerah pedesaan. Dengan demikian dapat pula diamati bahwa di dalam hirarki desa, para pemilik tanah bersama dengan pejabat pemerintah desa yang umumnya bertindak sebagai penguasa tanah, menduduki lapisan atas di dalam stratifikasi sosialnya. Selanjutnya mereka yang tergolong di dalam lapisan sosial elit desa terdiri dari para pemimpin agama serta para keturunan pendiri desa. Dalam pada itu penduduk desa lainnya yang tidak memiliki tanah, petani penggarap dan buruh tani menduduki lapisan sosial paling bawah.

Pranata agraris yang kuat mulai goyah pada abad ke-19 yang menggoyahkan itu, bukan munculnya kerusuhan hebat atau pergantian kepemimpinan yang penuh pertumpahan darah, melainkan dalam wujud hadirnya tanaman tebu di kalangan petani jawa.

Tebu sudah masuk ke Jawa sejak tahun 1629 lewat Banten. Tebu dibudidaya dengan metode bercocok tanam yang baru bagi pranata agraris di Jawa yaitu perkebunan. Tiga pola bercocok tanam yang tidak perlu adalah bercocok tanam di lahan kering (ladang berpindah dengan merambah hutan) lahan basah (sawah) kebun yang merupakan *verger* (kebun buah) atau Jardin (sayuran) (C. Srisusyoko Hermawan, Kompas 1 Desember 2000, hal. 29).

Tebu bersaing dengan padi di sawah. Kedua tanaman sama-sama menuntut lahan yang subur dengan pengairan yang teratur. Persaingan tersebut dimenangkan oleh tebu berkat bantuan tanaman paksa disusul munculnya sejumlah perkebunan tebu di Jawa.

Sementara produksi gula meningkat, produksi pada terus susut. Pada tahun 1874 luas lahan tebu masih tujuh persen tetapi pada tahun 1914 naik menjadi 10 persen sementara padi naik dari 16 jadi 18 persen. Akan tetapi, tebu merebut lahan yang subur dan beririgasi, sementara padi pindah ke lahan kering bahkan tidak subur. Hasil panen pun banyak yang disimpan untuk konsumsi sendiri bukan untuk dijual. Minat petani untuk mendapat uang lewat padi sudah merosot karena sejak tahun 1690 penguasa selalu menekan harga beras dengan alasan stabilisasi harga.

Tidak heran jika pada akhirnya krisis pangan menerpa Jawa hingga Hinda-Belanda, dan mulailah impor beras untuk pertama kali dari Srilangka pada tahun 1847. Pudar sudah predikat Jawa yang dianggap sebagai pengekspor beras terbesar.

BANDIT SOSIAL

Sepanjang sejarah kita menyaksikan protes sosial petani menentang dominasi ekonomi, politik, dan kultural yang "menindas", bukan saja protes sosial yang bersifat keagamaan, tapi juga protes berupa kerusuhan. Beberapa bentuk kerusuhan sebagai bentuk protes sosial petani itu adalah "perkecuan", yang termasuk "perbanditan sosial" dalam pergerakan sosial. Juga "pembegalan" yang dianggap sebagai gangguan keamanan di pedesaan, khususnya di perkebunan tebu, tembakau, dan kopi.

Tindakan ini merupakan protes petani terhadap perusahaan perkebunan yang banyak merugikan petani. Bandit adalah seseorang atau kelompok yang menyerang dan merampok dengan kekerasan. Namun demikian, bandit ini dibedakan: "bandit biasa" (*ordinary bandit*) dan "bandit sosial" (*social bandit*). Gerakan perbanditan dilakukan untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan dan eksploitasi, merupakan resistensi terhadap kemiskinan, tekanan pajak, kerja wajib, dan tekanan sosial politik, dan bertujuan mengembalikan miliknya yang diserobot penguasa.

Berdasarkan kesadaran politik, resitensi petani berupa perbanditan dapat dibedakan menjadi – gerakan yang belum sadar politik (resistensi pra-politik); setengah sadar (resistensi quasi – politik); dan sadar sepenuhnya (resistensi sadar politik). Resistensi pertama lebih didominasi oleh tindakan kejahatan semata-mata yang diwujudkan dalam pencurian, "begal", dan sejenisnya. Sementara yang kedua, dilakukan individu atau kelompok yang diwujudkan dalam perampokan dan perkecuan. Sedang yang ketiga, diwujudkan dalam bentuk gerilya, pemberontakan, dan sejenisnya. Perbanditan itu sendiri dapat digolongkan menjadi tiga: kriminalitas (*criminal bandit*), perbanditan (*banditry*), dan pemberontakan (*rebellion*).

Dalam kerangka lebih luas memahami dunia perbanditan sudah sewajarnya mengkaitkan dunia konflik, khususnya dalam masyarakat kapitalis agraris di Jawa sejak pertengahan abad ke-19. konflik ini terjadi antara dua pihak yang selalu muncul ke permukaan dan dimanifestasikan dalam bentuk perbanditan. Faktor eksternal merupakan kekuatan luar yang dominan sebagai hasil akumulasi kekuatan yang terjadi di semua bidang kehidupan. Karenanya, diperlukan pendekatan antardisiplin yang melintasi bidang sejarah. Dimensi ekonomi, politik, dan kultural ikut serta menjelaskan proses perbanditan.

Secara sosio-kultural dapat dikatakan otonomi masyarakat, khususnya petani, sudah tereduksi. Secara ekonomis kehidupan petani selalu berada di bawah (garis) subsistensi. Dalam keadaan biasa pendapatan mereka selalu lebih rendah daripada pengeluaran untuk belanja kebutuhan primer. Dengan masuknya perkebunan sebagai kekuatan eksternal, maka terjadilah presi majemuk yang menyebabkan kehidupan petani semakin kuat. Dependensi berkelanjutan terhadap perkebunan menjadi lingkaran yang sulit diputuskan. Beroperasinya ekonomi kapitalis, diperkuat oleh unsur-unsur budayanya yang turu melemahkan sendi budya lokal. Dalam menghadapi budaya eksternal ini dicari jalan keluar dan dengan memperkuat unsur budaya sendiri. Saluran tradisional menjadi wadah "pertahanan" terhadap proses dislokasi yang sedang terjadi. Dislokasi yang merupakan dampak konflik kepentingan menciptakan kekuatan responsif dalam bentuk resistensi yang dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Petani sebagai golongan lemah tereksploitasi melakukan resistensi sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk pengetahuan budaya yang menjadi miliknya.

Pada dasarnya resistensi perbanditan merupakan bentuk *balance of power*. Kekuatan politik kolonial berkolusi dengan kekuatan lain sehingga sukar ditandingi oleh petani. Otonomi petani sudah didegradasikan kekuatan asing sampai pada tingkat yang dapat dipertahankan lagi. Degradasi milik dan tenaga kerja mereka yang sudah ditelan perkebunan harus direbut kembali. Rasa tidak puas dan kerugian materi yang berlanjut mendorong gerakan proses petani. Dengan kekuatan seadanya petani mengimbangi kekuatan perkebunan untuk mendapatkan hak-haknya. Meskipun resistensi yang dilakukan petani tidak pernah berhasil sepenuhnya, tetapi resistensi mereka dapat dipandang sebagai gengsi menolak kekuatan luar dalam berbagai manifestasinya. Kesadaran menolak dalam resistensi ini selalu eksis sampai akhir pemerintah Hindia Belanda. Ini menunjukkan *balance of power* bukannya secara langsung menggulingkan sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah kepada upaya untuk tetap hidup dalam sistem ini sekarang, minggu ini, musim ini. Biasanya tujuan tani ialah menjalankan sistem demi kerugian minimal bagi dirinya.

Sebenarnya tidak selalu perkebunan petani mengambil bentuk aksi bersama, apalagi protes terbuka. Selain itu banyak aksi yang dimaksudkan sebagai pemukul balik seperti pemberontakan yang berakibat di luar perhitungan sebelumnya dan atau ideologis. Seolah-olah ada kiasan yang dapat dipercaya kelompok ekonomi lemah boleh menolak kondisi-kondisi yang dijatuhkan oleh kelompok dominan secara sama kasarnya tergantung beberapa segi.

Untuk masyarakat yang struktur posisinya tidak menguntungkan *everyday forms of resistance* mungkin lebih berhasil dalam jangka pendek dan jangka panjang ketimbang merumuskan protes secara umum yang hanya layak dilakukan bila risiko penyelesaiannya besar. Perlawanan kaum lemah hanya butuh sedikit atau tanpa koordinasi, dan mereka secara langsung menentukan dominasi kaum elit yang dapat menurunkan kewibawaan serta produktivitas pemerintah ke titik di mana elit secara ideologis hubungan antara rakyat dan raja diungkapkan dalam konsep *jumbuhing Kawula lan Gusti* (menyatunya rakyat dan rajanya).

Dalam kerangka ini peran tidak lebih dari sekedar "pendukung" dalam suatu struktur yang mencerminkan hubungan *patron-client*. Oleh karenya, dalam corak hubungan seperti ini "partisipasi" rakyat tidak bisa lain dari pengertian "mobilisasi" atau partisipasi yang semu sifatnya. Dalam corak hubungan seperti itu, rakyat biasanya dianggap berorientasi ke atas. Namun, bagi sejarawan Onghokham (1985), masyarakat Indonesia justru menunjukkan gejala-gejala politik dan sosial yang renggang (*loosely structed societies*), berbeda dengan masyarakat Barat yang ketat dalam struktur dan hirarki.

Menarik untuk diketahui pernyataan Onghokham (1985), bahwa dinamika politik masa itu didorong pula oleh apa yang disebut sebagai *rival centers power*, yaitu persaingan diantara para penguasa kelas menengah yang berhubungan langsung dengan rakyat. Karena merekalah yang berhubungan dengan rakyat (misalnya dalam pemungutan pajak), maka mereka mampu menciptakan semacam bargaining position dalam berhadapan dengan raja. Konflik dan pergolakan untuk sebagian terjadi karena mereka.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pergolakan sosial dalam sejarah telah mengambil berbagai bentuk gerakan dengan faktor-faktor pendorong atau penyebab yang juga berbeda-beda. Pada masa revolusi kemerdekaan 1945-1949, misalnya muncul berbagai pergolakan sosial yang bersifat antifeodal, seperti dalam "Peristiwa Tiga Daerah" di Jawa Tengah, pergolakan sosial di Sumatera Timur tahun 1946 atau konflik antara Uleebalang dan Ulama Aceh tahun yang sama. Ini berarti faktor-faktor penyebab pergolakan sosial itu beraneka ragam dan akan tetap merupakan benih-benih yang dapat melahirkan pergolakan baru, apabila situasi yang ada memang telah menciptakan dorongan ke arah itu.

PENUTUP

Upaya menjelaksan potensi timbulnya proses petani dapat dilihat dalam tiga faktor. *Pertama*, akibat meluasnya komersialisasi pertanian yang mengakibatkan merosotnya keamanan petani, terbongkarnya hubungan-hubungan sosial pedesaan dan melemahnya nilai-nilai tradisional. *Kedua,* faktor pembentukan organisasi poltik yang berasal dari luar masyarakat petani yang mengembangkan tuntutan sumberdaya ekonomi perlindungan, keahlian berorganisasi dan sistem nilai baru. *Ketiga*, respons negara khususnya perpaduan dari pilihan antara reformasi dan penindasan yang menimbulkan dampak penting pada lingkup dan intensitas mobilitas petani.

Masing-masing faktor yang dikemukakan di atas itu merupakan faktor penting di dalam memahami "anarki sosial" petani saat ini. Tidak dapat dipungkiri pada dasarnya transformasi agrarian dalam bentuk macam apapun (terutama revolusi hijau Orde Baru) telah menimbulkan marginalisasi khususnya petani miskin. Kini, faktor penting dari perlawanan mereka adalah serbuan pada keamanan ekonomi mereka. Sebagai salah satu faktor, "krisis subsistensi" ini sangat dekat dengan pemahaman Scott